



# Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Zia Sahara Pahrudin, Ajeng Novia Fitri, Sri Ajeng Ratu Gusti, Arif Fadilla\*

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstract:** Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal, salah satunya di Indonesia. Akibatnya, kemiskinan di Indonesia meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Masyarakat di seluruh Indonesia telah menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Selama pandemi, pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Indonesia memiliki masalah yang serius terkait ketimpangan ekonomi dan akses terhadap bantuan sosial mungkin menghadapi tantangan khusus dalam distribusi dan aksesibilitas BLT, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pembagian bantuan. Maka dari itu, penting untuk melakukan monitoring dalam evaluasi yang cermat. Tujuan penelitian ini untuk 1) Menganalisis seberapa efektif program BLT, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program BLT, 3) Menilai dampak social dan ekonomi terhadap penerima program BLT. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi literatur, seperti: jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan informasi dari internet yang dinilai sangat akurat. Hasil kajian pemberdayaan ekonomi melalui BLT di Indonesia menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mengurangi tekanan ekonomi. Melalui pemberian rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis efektivitas dan tantangan implementasi, penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang menghasilkan program BLT lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kesadaran akan kebijakan di masyarakat umum. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih disengaja dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ketimpangan, Pemerataan, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.235>

\*Correspondence: Arif Fadilla

Email: [Ariffadilla@fe.unsika.ac.id](mailto:Ariffadilla@fe.unsika.ac.id)

Received: 22-05-2024

Accepted: 22-05-2024

Published: 28-05-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

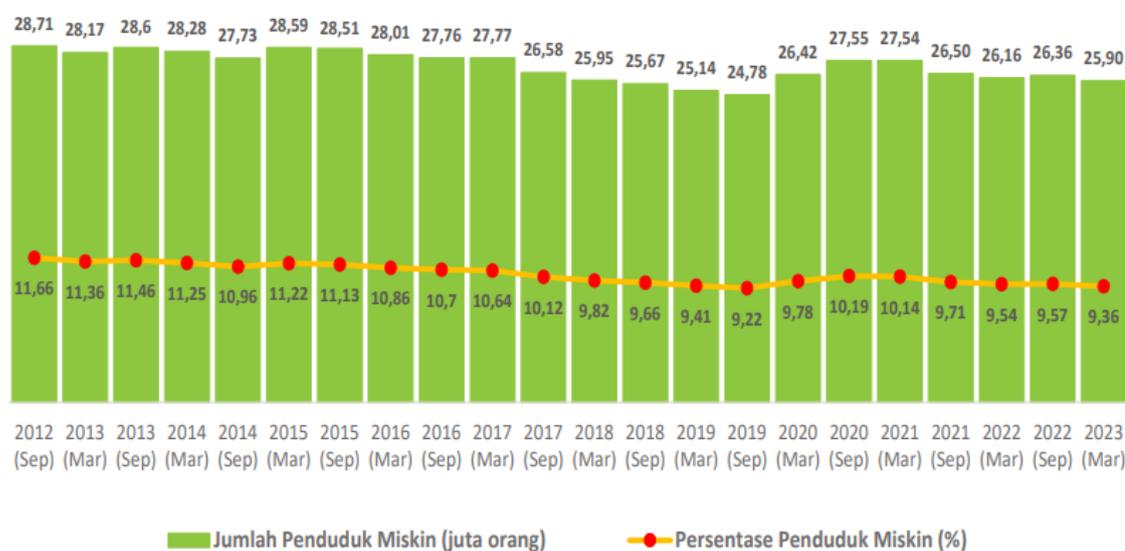
**Abstract:** Poverty is a problem facing the whole country, especially in developing and lagging behind countries, one of them in Indonesia. As a result, poverty in Indonesia has increased as a result of the COVID-19 pandemic. Communities across Indonesia have faced significant economic stress as a result of the COVID-19 pandemic. During a pandemic, restrictions on economic activity and community mobility can cause an increase in the need for social assistance such as Direct Cash Assistance (BLT). Indonesia has serious problems with economic inequality and access to social assistance may face particular challenges in the distribution and accessibility of BLT, which could lead to inequities in the distribution of aid. Therefore, it is important to carry out careful monitoring and evaluation. The aim of this research is to 1) Analyze how effective the BLT program is, 2) Identify factors that influence the success or failure of the BLT program, 3) Assess the social and economic impact on recipients of the BLT program. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection in this research was through literature studies, such as: journals, books, previous research, and information from the internet which was considered very accurate. The results of a study of economic empowerment through BLT in Indonesia show that this program has significant potential in increasing the capabilities and welfare of underprivileged communities and reducing economic pressure. By providing policy recommendations based on an analysis of effectiveness and implementation challenges, this research can assist policy makers in creating policies that result in a more effective and efficient BLT

program as well as increasing awareness of the policy in the general public. Therefore, the findings of this research have implications for efforts to achieve more deliberate and sustainable economic development in Indonesia.

**Keywords:** *Inequality, Equity, Direct Cash Assistance (BLT)*

## Pendahuluan

Dari September 2012 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dalam jumlah maupun persentase. Tidak seperti September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2022, dan September 2022, di mana tingkat kemiskinan meningkat. Peningkatan persentase penduduk miskin terjadi pada September 2013, Maret 2015, dan September 2022 karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Di sisi lain, ketika pembatasan mobilitas penduduk diberlakukan selama pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 dan September 2020. Tingkat kemiskinan meningkat dari September 2012 hingga Maret 2023, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. (Statistik B. P., 2023)



**Gambar 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012–Maret 2023

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

(Statistik B. P., 2023) Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Ini berbeda dengan target pemerintah untuk angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebesar 6,5–7,5 persen. Data terbaru menunjukkan tren yang perlu diperhatikan dalam angka kemiskinan Indonesia. Meskipun ada penurunan umum, jumlah individu dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan terus meningkat (Ahmad & Komang, 2023). Ketimpangan ekonomi, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan kondisi geografis dan demografis adalah penyebab utama ketidakmerataan kekayaan dan peluang di masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang cepat, sangat penting untuk memahami akar masalah kemiskinan dan solusi yang tepat. (Statistik B. P., 2023)

---

Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020, negara telah menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang signifikan. Pada awal penyebaran COVID-19 di Indonesia, pandemi menimbulkan serangkaian kebijakan yang membatasi aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kesejahteraan sosial, yang menyebabkan pengurangan kegiatan ekonomi dan peningkatan pemerataan dalam beberapa sektor ekonomi. Ketimpangan dan pemerataan ekonomi selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Sebagai bagian dari program bantuan sosial, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan persentasenya. Program ini bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan yang terdampak langsung oleh pandemi dengan tujuan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka alami saat ini. Bantuan Langsung Tunai (BLT) memainkan peran penting dalam menangani dampak ekonomi pandemi. Namun, distribusi BLT sering menghadapi masalah dalam menentukan penerima yang tepat, transparansi, dan aksesibilitas penyaluran ke penerima yang tepat. (Ratna & Habib, 2021)

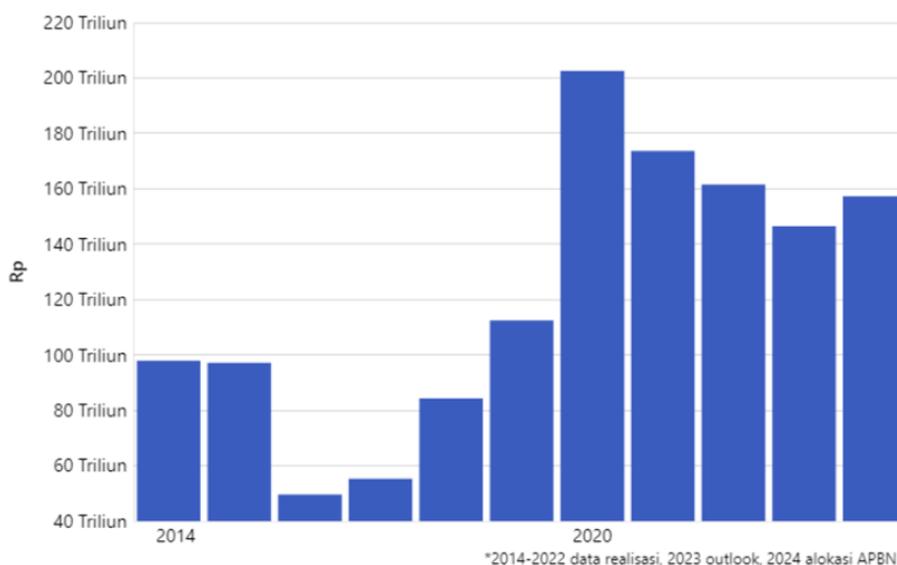
Bantuan langsung tunai dapat berdampak positif atau negatif pada penerimanya, tergantung pada berbagai faktor. Salah satu efek positifnya adalah bantuan dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki keadaan ekonomi penerimanya. Selain itu, menjaga penghidupan usaha kecil dapat berfungsi sebagai jaring pengaman selama krisis seperti pandemi COVID-19. Selain itu, bantuan langsung tunai dapat menjadi bentuk dukungan yang lebih efektif dibandingkan bantuan dalam bentuk natura, karena penerima memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana memanfaatkan dana tersebut. Namun, ada kemungkinan bahwa bantuan langsung tunai juga dapat memiliki efek yang tidak menyenangkan. Ini dapat menyebabkan orang yang menerima bantuan menjadi terlalu bergantung pada bantuan. Mereka juga dapat kehilangan motivasi untuk bekerja atau menjadi wirausaha. Selain itu, distribusi bantuan langsung dapat menjadi sulit karena ketidakefektifan dan korupsi, dan sebagian besar dana dapat disalahgunakan. (Ahmad & Komang, 2023)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan membaca literatur seperti jurnal, buku, penelitian sebelumnya, dan informasi dari internet yang dievaluasi secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, perspektif, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam dan holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi transkripsi data, koding, identifikasi tema, dan penafsiran data. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, dilakukan triangulasi data dan member checking dengan subjek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 telah meningkatkan kemiskinan, merusak ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Meskipun ada kendala yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan tunai langsung (BTL), tindakan pemerintah melalui program ini sangat penting untuk mengurangi efek ekonomi yang merugikan ini. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk memerangi kemiskinan, terutama selama krisis ini, menurut evaluasi tentang kinerja program bantuan dan kebijakan lainnya. Langkah-langkah yang lebih terpadu dan berkolaborasi diperlukan untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. (Ahmad & Komang, 2023)



**Gambar 2.** Anggaran Bansos 2024 Bertambah Rp10 Triliun

Sumber: Diolah dari data Anggaran Bansos dalam APBN Indonesia (2014-2024)

Pemerintah menempatkan Rp157,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 untuk bantuan sosial. Ini naik sebesar 7,4 persen dari perkiraan realisasinya pada tahun 2023, yang mencapai sekitar Rp10,8 triliun. Meskipun alokasi anggaran bantuan sosial untuk tahun 2024 lebih rendah dibandingkan saat pandemi COVID-19 melanda, meskipun alokasi bantuan sosial sempat mencapai puncaknya pada awal pandemi tahun 2020 dengan angka mencapai Rp200 triliun, tetapi tetap menunjukkan peningkatan dari periode sebelum pandemi. Alokasi APBN untuk bantuan sosial kemudian berangsur-angsur turun pada tahun 2021-2022 saat pandemi mereda, tetapi tetap di atas tingkat sebelum pandemi, seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. (Adi, 2024)

(Badan, 2024) Pada tahun 2024, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, dan program rehabilitasi akan dimulai. Pada tahun 2024, dana bansos akan difokuskan pada bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, dan program rehabilitasi sosial untuk kelompok

masyarakat rentan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dengan tepat. Data berikut terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di salah satu provinsi di Indonesia, menurut sumber:

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)					
	Rencana			Realisasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bogor	171 483	189 990	172 669	1 714 830	180 110	172 629
Sukabumi	163 547	161 756	175 599	161 045	161 043	175 599
Cianjur	189 959	189 959	212 715	1 899 590	189 959	212 715
Bandung	168 246	166 946	181 648	166 430	166 432	181 526
Garut	171 870	169 955	185 467	169 196	169 175	185 394
Tasikmalaya	125 555	135 357	148 901	1 255 550	134 859	148 901
Ciamis	85 658	85 141	85 375	72 930	84 940	85 376
Kuningan	82 082	82 830	81 007	820 820	82 479	81 006
Cirebon	165 213	164 636	180 296	164 402	164 193	179 808
Majalengka	106 124	103 324	101 408	102 216	97 372	101 408
Sumedang	81 528	80 526	78 390	814 230	80 440	78 390
Indramayu	161 161	159 663	177 711	159 069	159 070	177 628
Subang	112 891	108 686	105 396	106 662	105 002	105 396
Purwakarta	46 582	46 757	45 420	465 820	46 440	45 420
Karawang	145 317	141 846	163 752	140 470	140 473	163 704
Bekasi	96 601	106 824	98 212	848 910	102 469	98 212
Bandung Barat	95 599	82 971	101 415	77 975	77 972	101 414
Pangandaran	29 575	33 538	31 819	295 750	33 527	31 819
Kota Bogor	41 759	35 074	35 960	32 713	32 257	35 957
Kota Sukabumi	14 389	12 114	16 053	11 215	12 114	16 048
Kota Bandung	63 262	54 308	61 122	51 123	50 763	61 109
Kota Cirebon	16 994	16 427	18 005	16 202	16 117	18 005
Kota Bekasi	68 253	62 613	67 674	60 582	60 381	67 670
Kota Depok	36 993	33 408	36 522	31 989	31 989	36 518
Kota Cimahi	18 724	16 641	17 030	15 817	15 817	17 025
Kota Tasikmalaya	49 617	47 397	49 342	46 520	46 519	49 330
Kota Banjar	8 717	8 294	8 988	8 127	8 127	8 988
Provinsi Jawa Barat	2 517 699	2 496 981	2 637 975	9 710 183	2 450 039	2 636 995

**Gambar 3.** Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga), 2018-2020  
Sumber: Diolah dari data Data Bantuan Sosial, Kementerian Sosial

Data di atas berasal dari penerima BLT dari tahun 2018–2020 di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Jumlah kepala keluarga yang menerima BLT setiap tahun ditunjukkan dalam kolom "Rencana" dan "Realisasi". Setelah melihat jumlah penerima bantuan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, realisasi dan rencana bantuan sosial pada tahun 2018 tidak mencapai target. Pengeluaran pemerintah provinsi sebesar 36.482.714.855,46 ribu rupiah tidak mencapai rencana bantuan sosial sebesar 2.517.699 rupiah, dan realisasinya hanya 9.710.1832 rupiah, menurut data

dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti perubahan dalam kebijakan, tindakan administrasi, atau kondisi ekonomi. (Badan, 2024)

Terdapat beberapa penilaian mengenai efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. Salah satunya terkait penetapan sasaran dan penyaluran, evaluasi menunjukkan bahwa penyaluran BLT sebagian besar gagal memenuhi harapan dalam memperoleh sasaran yang tepat. Terkadang, penerima bantuan tidak selalu merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut konsisten dengan pernyataan tersebut, upaya yang lebih besar harus dilakukan. Beberapa penelitian menemukan bahwa BLT berdampak positif dalam menurunkan ambang kemiskinan di wilayah terkait. Efeknya bervariasi tergantung pada implementasi dan kondisi saat ini. Memahami sepenuhnya efektivitas dan dampak program, diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh. Mengatasi masalah administratif, seperti birokrasi yang rumit dan biaya operasional yang tinggi. Peningkatan efisiensi administratif diperlukan untuk membuat program lebih efektif. (Ahmad & Komang, 2023)

## Simpulan

Menilai dampak sosial dan ekonomi terhadap penerima program Bantuan Langsung Tunai, studi pemberdayaan ekonomi melalui BLT di Indonesia menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mengurangi tekanan ekonomi. Penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang menghasilkan program BLT yang lebih efisien dan efektif serta meningkatkan kesadaran kebijakan di masyarakat umum melalui penyediaan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis efektivitas dan tantangan implementasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempunyai konsekuensi terhadap upaya yang dilakukan di Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih direncanakan dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- A, I. F., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan makro ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Jurnal FEB UNMUL*.
- Abdullah, F. (2021). Dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Adi, A. (2024, January 03). Anggaran Bansos 2024 bertambah Rp10 triliun. Anggaran Bansos dalam APBN Indonesia (2014-2024).
- Ahmad, Z. W., & Komang, P. (2023). Mengukur dampak program bantuan langsung tunai. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Tujuan pembangunan berkelanjutan. Diambil 18 Oktober 2022, dari Badan Pusat Statistik website: [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/192/sdgs\\_1/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/192/sdgs_1/1)

- 
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan. [webapi.bps.go.id](http://webapi.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penerima bantuan (Kepala Keluarga), 2018-2020. [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id).
- Clarita, S., Nurul, G., & Irianingsih, I. (2020). Pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2018 berdasarkan indikator kemiskinan dengan Polythetic Divisive Method. *Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*.
- Dimas, P., Priwiyanta, & A, W. D. (2023). Determinan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Indonesia tahun 1999-2000. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*.
- Dwiyana, A. H. (2016). Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Mahkamah*, 1.
- Evanty, C., & Hamrullah. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Jawa Barat 2017-2021. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*.
- F, E. D., Annisa, P., & Agustis, G. (2023). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh implementasi bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196-202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Fahrudin, R., Muspida, & Loppies, L. R. (2022). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(2).
- Faisal, M. (2019). Konsep dan manfaat greenhouse. Diambil 18 Oktober 2022, dari Pusat Manajemen Pengetahuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada website: <https://kmc.tp.ugm.ac.id/kms/konsepdan-manfaat-greenhouse/>
- Fitra Tsania, N., Setiawati, B., & Arfah, S. R. (n.d.). Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Islam, E., Kasus, S., Panaragan, D., Asri, T., Tulang, K. T., Tengah, B., Tulang, K. B., & Barat, B. (n.d.). Analisis efektivitas kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditinjau dalam perspektif.
- Jaelan, U., Muhammad, R., & Mahnoor, F. (2022). National program, local response: Dynamic of unconditional cash transfer distribution to poor families in Maros Regency, Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*.
- Katamso, N. S., Fayadh, A., & Marselino, A. R. (2022). Analisis spasial kemiskinan pada masa pemulihan pandemi COVID-19 di Jawa Barat tahun 2021.
- Lisnawati, & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4, 157-167. <https://doi.org/10.26905/Prefix10.26905>
- Marrolli. (2017, April 21). Presiden: Kebijakan pemerataan ekonomi untuk atasi ketimpangan. [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).
- Milenia, J. P., Novie, R. P., & Alfon, K. (2023). Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) pada masa COVID-19 di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*.

- 
- Ramadhan, A. F., & Fransiscus X. S. S. (2021). Keluarga miskin dan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban tahun 2021.
- Ramahdani, L. (2023). Alokasi dana desa, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Ratna, D., & Habib, F. A. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT). *Jurnal Menara Ilmu*, 79-83.
- Siti, M., & Hestu, R. C. (2022). Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.
- Suci Megawati, D. A. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 10, 175-190.
- Suroso, A., & Ety, R. (2020). Perencanaan partisipatif pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 4(2), 134-152.
- Wiwit, A. R., Tuti, A., & Nurul, I. (2020). Analisis bantuan BLT dan PKH untuk kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi COVID-19 ditinjau dari ekonomi Islam. *Journal Islamic Accounting Competency*.